



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI  
WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH  
PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
  8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 477);
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
2. Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Pelaksana Dekonsentrasi Kepada GWPP yang selanjutnya disebut Pelaksana Dekonsentrasi adalah perangkat GWPP yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang didekonsentrasikan.
6. Pelaksana Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pelaksana Tugas Pembantuan adalah perangkat daerah provinsi yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan.

## BAB II PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

### Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangannya kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi.
- (2) Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap:
  - a. pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah; dan
  - b. pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah.
- (3) Dekonsentrasi kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

### Pasal 3

- (1) Menteri mengalokasikan anggaran Dekonsentrasi di bidang perdagangan kepada daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksana Dekonsentrasi dapat merevisi atas alokasi anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya sama dengan dengan Urusan Pemerintahan yang didekonsentrasikan.

### Pasal 4

Dekonsentrasi kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan lokasi serta alokasi anggaran dekonsentrasi di bidang perdagangan tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

#### Pasal 5

- (1) Menteri menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren di bidang perdagangan yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (2) Tugas Pembantuan di bidang perdagangan kepada daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah.
- (3) Tugas Pembantuan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditugaskan kepada pihak lain.

#### Pasal 6

- (1) Menteri mengalokasikan anggaran Tugas Pembantuan di bidang perdagangan kepada daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pelaksana Tugas Pembantuan dapat merevisi atas alokasi anggaran Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya sama dengan dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuan.

#### Pasal 7

Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan lokasi serta alokasi anggaran Tugas Pembantuan di bidang perdagangan tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN

#### Pasal 8

- (1) GWPP atau Kepala Daerah Provinsi menetapkan Pelaksana Dekonsentrasi, Pelaksana Tugas Pembantuan, dan pejabat pengelola keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang yang dijabat oleh Pelaksana Dekonsentrasi dan Pelaksana Tugas Pembantuan;
  - b. pejabat pembuat komitmen;
  - c. pejabat penguji tagihan atau penandatanganan surat perintah membayar; dan
  - d. pejabat akuntansi dan bendahara pengeluaran.
- (3) GWPP atau Kepala Daerah Provinsi menyampaikan penetapan Pelaksana Dekonsentrasi dan Pelaksana Tugas Pembantuan dan penetapan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perbendaharaan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 9

GWPP atau Kepala Daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan Menteri mengenai:

- a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan; dan
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh Pelaksana Dekonsentrasi dan Pelaksana Tugas Pembantuan melalui pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan kepada daerah provinsi di bidang perdagangan tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2024



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIKINDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 4 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR  
 SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS  
 PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI BIDANG  
 PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN  
 DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

A. DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	279,072,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	105,842,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,770,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	76,072,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	173,230,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	58,590,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	114,640,000
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	255,817,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	85,557,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,845,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	55,712,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	170,260,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	53,942,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	116,318,000
3	GUBERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	241,310,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	84,064,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,980,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	54,084,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	157,246,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	52,472,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	104,774,000
4	GUBERNUR RIAU	RIAU	244,926,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	84,787,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,845,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	54,942,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	160,139,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	56,612,000



KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	103,527,000
5	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	256,710,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	97,035,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,860,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	67,175,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	159,675,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	51,952,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	107,723,000
6	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	255,410,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	85,236,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,980,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	55,256,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	170,174,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	71,640,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	98,534,000
7	GUBERNUR BENGKULU	BENGKULU	243,453,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	94,600,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,950,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	64,650,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	148,853,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	40,136,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	108,717,000
8	GUBERNUR LAMPUNG	LAMPUNG	223,062,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	85,815,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	28,265,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	57,550,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	137,247,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	44,558,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	92,689,000
9	GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	267,742,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	105,579,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	30,355,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	75,224,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	162,163,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		1 LAYANAN PERKANTORAN	52,922,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	109,241,000
10	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	269,706,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	85,947,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,965,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	55,982,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	183,759,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	63,937,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	119,822,000
11	GUBERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	221,300,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	54,650,000
		1 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	54,650,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	166,650,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	70,320,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	96,330,000
12	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	230,291,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	86,117,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	31,125,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	54,992,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	144,174,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	52,660,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	91,514,000
13	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	252,172,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	92,507,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	30,330,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	62,177,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	159,665,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	62,436,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	97,229,000
14	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	250,570,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	90,039,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,670,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	60,369,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	160,531,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		1 LAYANAN PERKANTORAN	54,954,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	105,577,000
15	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	248,743,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	85,385,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	30,415,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	54,970,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	163,358,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	53,896,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	109,462,000
16	GUBERNUR BANTEN	BANTEN	216,817,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	87,238,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,890,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	57,348,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	129,579,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	37,920,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	91,659,000
17	GUBERNUR BALI	BALI	296,167,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	88,062,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	28,050,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	60,012,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	208,105,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	87,632,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	120,473,000
18	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	267,722,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	85,496,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	30,700,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	54,796,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	182,226,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	59,193,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	123,033,000
19	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	261,359,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	87,770,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	31,306,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	56,464,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	173,589,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		1 LAYANAN PERKANTORAN	57,200,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	116,389,000
20	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	248,474,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	84,502,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,965,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	54,537,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	163,972,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	59,024,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	104,948,000
21	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	228,605,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	85,887,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,695,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	56,192,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	142,718,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	42,756,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	99,962,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
22	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	253,522,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	85,152,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,965,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	55,187,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	168,370,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	51,598,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	116,772,000
23	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	253,372,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	84,642,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	28,840,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	55,802,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	168,730,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	55,628,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	113,102,000
24	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	283,545,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	92,931,000



KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	28,960,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	63,971,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	190,614,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	56,036,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	134,578,000
25	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	281,824,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	92,470,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	28,840,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	63,630,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	189,354,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	67,448,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	121,906,000
26	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	272,271,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	90,215,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,740,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	60,475,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	182,056,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		1 LAYANAN PERKANTORAN	62,380,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	119,676,000
27	GUBERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	247,695,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	83,710,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	28,340,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	55,370,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	163,985,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	57,694,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	106,291,000
28	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	252,699,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	85,010,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,905,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	55,105,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	167,689,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	57,152,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	110,537,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
29	GUBERNUR GORONTALO	GORONTALO	287,415,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	110,870,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	44,765,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	66,105,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	176,545,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	58,080,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	118,465,000
30	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	261,053,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	87,643,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	30,385,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	57,258,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	173,410,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	56,590,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	116,820,000
31	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	299,200,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	86,930,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	28,310,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	58,620,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	212,270,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	64,522,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	147,748,000
32	GUBERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	300,890,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	96,525,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	30,685,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	65,840,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	204,365,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	59,238,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	145,127,000
33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	309,756,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	95,045,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	30,445,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	64,600,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	214,711,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	69,078,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	145,633,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
34	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	323,491,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	94,885,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	29,355,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	65,530,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	228,606,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	71,252,000
		2 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	157,354,000
35	GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN	PAPUA PEGUNUNGAN	95,650,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	95,650,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	30,550,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	65,100,000
36	GUBERNUR PAPUA SELATAN	PAPUA SELATAN	98,564,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	98,564,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	30,685,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	67,879,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
37	GUBERNUR PAPUA TENGAH	PAPUA TENGAH	99,780,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	99,780,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	30,445,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	69,335,000
38	GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA	PAPUA BARAT DAYA	96,549,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	96,549,000
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN	
		1 PEMANTAUAN HARGA KOMODITI DI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2024	30,355,000
		2 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER	66,194,000

B. TUGAS PEMBANTUAN NONFISIK BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	349,139,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	20,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	78,139,000
		3 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DI DAERAH	225,000,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	26,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	376,900,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	35,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	89,900,000
		3 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DI DAERAH	225,000,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	27,000,000
3	GUBERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	486,003,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	228,989,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	85,014,000
		4 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DI DAERAH	107,000,000
		5 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,000,000
4	GUBERNUR RIAU	RIAU	275,719,006
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	92,719,000
		3 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DI DAERAH	118,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,000,000
5	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	457,392,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	28,870,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	183,602,000
		3 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DI DAERAH	216,000,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	28,920,000
6	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	164,203,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	97,203,000
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	27,000,000
7	GUBERNUR BENGKULU	BENGKULU	154,401,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	89,401,000
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,000,000



KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
8	GUBERNUR LAMPUNG	LAMPUNG	258,361,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	38,200,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	74,161,000
		3 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DI DAERAH	116,000,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	30,000,000
9	GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	344,907,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	19,547,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	192,360,000
		3 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DI DAERAH	108,000,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,000,000
10	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	375,944,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	224,315,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	86,629,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
11	GUBERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	268,976,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 MONITORING PENDATAAN DAN VERIFIKASI GUDANG	21,334,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	177,642,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	30,000,000
12	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	353,665,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 MONITORING PENDATAAN DAN VERIFIKASI GUDANG	106,714,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	173,951,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	33,000,000
13	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	321,571,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 MONITORING PENDATAAN DAN VERIFIKASI GUDANG	98,750,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	72,821,000
		4 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DI DAERAH	75,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		5 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	35,000,000
14	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	173,871,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	35,331,000
		2 MONITORING PENDATAAN DAN VERIFIKASI GUDANG	27,534,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	80,926,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	30,080,000
15	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	471,399,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	35,000,000
		2 MONITORING PENDATAAN DAN VERIFIKASI GUDANG	141,124,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	263,275,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	32,000,000
16	GUBERNUR BANTEN	BANTEN	299,671,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	35,000,000
		2 MONITORING PENDATAAN DAN VERIFIKASI GUDANG	28,326,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	74,345,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		4 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DI DAERAH	134,000,000
		5 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	28,000,000
17	GUBERNUR BALI	BALI	178,091,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30,000,000
		2 MONITORING PENDATAAN DAN VERIFIKASI GUDANG	33,724,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	89,367,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,000,000
18	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	372,467,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	35,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	96,467,000
		3 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DI DAERAH	216,000,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,000,000
19	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	154,896,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	36,590,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	93,306,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,000,000
20	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	151,819,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	83,819,000
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	28,000,000
21	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	157,503,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	91,903,000
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,600,000
22	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	250,643,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	185,143,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,500,000
23	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	384,433,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	206,696,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	109,737,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	28,000,000
24	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	168,842,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	36,765,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	104,077,000
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	28,000,000
25	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	383,828,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	95,828,000
		3 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DI DAERAH	223,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,000,000
26	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	141,031,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	76,031,000
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,000,000
27	GUBERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	160,080,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	36,218,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	91,420,000
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	32,442,000
28	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	346,656,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	35,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	94,656,000
		3 PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DI DAERAH	187,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	30,000,000
29	GUBERNUR GORONTALO	GORONTALO	148,115,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	25,795,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	102,120,000
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	20,200,000
30	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	150,881,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	35,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	90,881,000
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,000,000
31	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	172,984,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	40,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	107,984,000
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,000,000



KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
32	GUBERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	166,468,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	36,750,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	104,718,000
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	25,000,000
33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	212,795,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	50,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	135,795,000
		3 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	27,000,000
34	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	272,407,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	45,000,000
		2 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN PASAR	74,357,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	125,050,000
		4 PELATIHAN PELAPORAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL INDUSTRI, SERTA BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2024	28,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
35	GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN	PAPUA PEGUNUNGAN	136,827,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	50,000,000
		2 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN PASAR	61,130,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	25,697,000
36	GUBERNUR PAPUA SELATAN	PAPUA SELATAN	129,949,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	50,000,000
		2 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN PASAR	54,153,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	25,796,000
37	GUBERNUR PAPUA TENGAH	PAPUA TENGAH	72,390,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	50,000,000
		2 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	22,390,000
38	GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA	PAPUA BARAT DAYA	136,087,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	50,000,000
		2 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN PASAR	60,360,000
		3 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	25,727,000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN